

347.035

MUZ

P

**PENYIMPANGAN PROSEDUR  
DI MAHKAMAH AGUNG RI**



Oleh :

**H.M. MAWARDI MUZAMIL, SH, CN, MM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS HUKUM  
SEMARANG  
1996**

## PENYIMPANGAN PROSEDUR DI MAHKAMAH AGUNG RI ?

Mahkamah Agung RI beberapa bulan terakhir ini menjadi pusat pemberitaan Surat kabar baik Nasional maupun Daerah tentang adanya isu kolusi yang terjadi di Lembaga Peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung , sehingga membuat siapa saja yang membaca atau mendengarnya merasa prihatin. Berita berita tersebut terutama yang terkait dengan kasus perkara Gandhi Memorial School (GMS). Apalagi informasi tentang telah terjadinya kolusi itu justru kebetulan bersumber dari salah seorang Ketua Muda Mahkamah Agung sendiri.

Selain isu kolusi yang menyangkut perkara Gandhi Memorial School, sebetulnya juga ada kasus sengketa tanah di Surabaya yang oleh pihak yang dikalahkan rupanya melaporkan seakan-akan telah terjadi kolusi di lembaga peradilan tertinggi itu. Belum lagi kasus-kasus lain yang melibatkan Mahkamah Agung yang oleh publik langsung diasosiasikan dengan kolusi. Akibatnya, selama tiga bulan terakhir ini, nama baik atau reputasi Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir bagi penegakan keadilan benar-benar dalam cobaaan.

-----  
Makalah disampaikan sebagai sumbangan pikiran dalam Seminar : Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Pengadilan Di Indonesia diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP menyambut Lustrum ke VIII/ tanggal 20 November 1996

Sesungguhnya Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat dalam menghadapi isu atau tuduhan kolusi tersebut. Dalam hal kasus sengketa tanah di Surabaya misalnya, Mahkamah Agung segera memberikan penjelasan yang intinya membantah adanya kolusi di lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Demikian halnya dengan kasus perkara Gandhi Memorial School, yang karena permasalahannya lebih kompleks dan pihak yang mengungkapkan adanya kolusi dari kalangan dalam Mahkamah Agung sendiri, maka telah dibentuk Tim Kowarsus (Kordinator Pengawasan Khusus) untuk meneliti serta mempelajari duduk persoalannya secara gamblang.

Laporan hasil kerja Tim Kowarsus pun telah disampaikan kepada masyarakat oleh Ketua Mahkamah Agung Soerjono SH seusai melapor kepada Presiden. Intinya, seperti disampaikan Soerjono SH, tak ada terjadi kolusi di Mahkamah Agung

#### **Hasil penelitian Kowarsus**

Dalam keterangannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Tim Kowarsus yang dipimpin Sarwata SH tidak ditemukan adanya fakta dan dokumen yang mendukung adanya kolusi dalam penyelesaian perkara terdakwa Ram Gulumal alas V Ram. Dalam kasus ini, menurut Ketua Mahkamah Agung, yang terjadi hanya penyimpangan prosedur pembagian berkas perkara pidana. Tentu saja penjelasan Ketua Mahkamah Agung itu mendapat reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Adi Andoyo, pelontar isu kolusi,

yang menyatakan ketidak puasannya terhadap hasil yang diumumkan Ketua Mahkamah Agung itu. Adi Andoyo bahkan menyatakan telah terjadi pengkaburan dan perbedaan penafsiran antara kolusi dengan korupsi. Pemeriksaan Kowarsus, kata Adi Andoyo, belum lengkap. Karena itu dibutuhkan pemeriksaan tambahan.

Keinginan Adi Andoyo itu tampaknya tidak akan pernah dipenuhi. Hasil yang diumumkan, menurut Mahkamah Agung, sudah final. Itu artinya tak akan ada pemeriksaan tambahan lagi.

#### **Catatan Sejarah Peradilan**

Meski demikian apa yang disampaikan Adi Andoyo akan tetap menjadi catatan tersendiri bagi sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Dan kita akan menghargai apa yang dikemukakan Adi Andoyo, sebagai pendapat yang sah-sah saja. Apalagi di Indonesia adanya perbedaan tidak dilarang. Sebaliknya, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang harus tetap dijunjung tinggi. Dan kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tak bisa dielakkan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Adi Andoyo masih akan tetap ada, walau kemudian acapkali dikalahkan.

Keterangan atau penjelasan yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung sendiri ternyata tidak langsung mendapat penerimaan secara lugas dari seluruh masyarakat. Sebagian ada yang mengoreksi adanya kesalahan data, ada yang masih

meragukan penjelasan tersebut, sebagian lagi menganggapnya telah memadai.

Karena itu dalam masyarakat tetap, terdapat suara-suara atau pandangan yang menghendaki penuntasan penyelidikan kasus-kasus kolusi tersebut, sekalipun bobot tuntutan sudah jauh lebih berkurang. Hal ini tentu saja membuat diskusi publik tentang kolusi di Mahkamah Agung itu belum bisa berakhir, sehingga citra dan kewibawaan lembaga peradilan tertinggi tersebut belum dapat dipulihkan.

Kita memang tidak harus berperasangka buruk terhadap penilaian negatif yang masih diberikan masyarakat pada Mahkamah Agung seperti yang dikemukakan di atas. Apalagi sampai menyalahkan masyarakat. Sebab pada dasarnya adanya tuduhan atau penilaian seperti itu sama sekali tidak terlepas dari iklim ataupun situasi lingkungan yang ada di sekitar kita.

Sedikitnya ada tiga faktor yang membuat tidak mudah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kewibawaan Mahkamah Agung pada saat ini.

a> adanya isu-isu negatif yang lebih dulu berkembang di lingkungan masyarakat penegakan hukum kita. Misalnya isu adanya mafia pengadilan, isu jual beli hukum dan sebagainya. Isu-isu seperti itu telah lama berkembang pada tingkat peradilan di tingkat bawah atau menengah/tinggi. Oleh karena itu bukan hal mustahil kalau hal itu juga bisa masuk ke lembaga peradilan yang paling tinggi, Mahkamah Agung.

b> dalam alam kemajuan teknologi yang makin canggih dewasa ini, upaya untuk menemukan kebenaran dalam rangka menetapkan keadilan kiranya semakin sulit.

Pada saat sekarang ini, di mana telah banyak beredar dokumen-dokumen aspal (asli tapi palsu), jelas telah membuat peradilan seperti Mahkamah Agung menjadi sangat tertantang. Apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan pihak-pihak berperkara ingin menggunakan upaya hukum yakni pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan kasasi Mahkamah Agung.

c. Sumber pelemparan isu kolusi di Mahkamah Agung itu justru dari salah seorang Ketua Muda Mahkamah Agung sendiri, merupakan suatu hak yang sangat menarik.

Sehingga menjadi sulit bagi pihak luar untuk tidak mempercayai tudingan adanya kolusi seperti yang terjadi pada kasus perkara Gandhi Memorial School, tersebut.

Orang awam hukum pun akan melihat dan menilai, tentu ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen Mahkamah Agung. Hal ini pulalah yang agaknya telah membuat banyak pihak dalam masyarakat seakan ingin agar Ketua Mahkamah Agung mengakui adanya kolusi yang dituduhkan itu.

### **Sikap Arif**

Sangat tidak bijaksana jika isu kolusi yang menyentuh lembaga tertinggi di bidang hukum ini dibiarkan terus berlarut. Kita tahu, masalah kolusi sangat abstrak sifat

nya. Apalagi bila masalah tersebut lebih didasarkan pada asumsi-asumsi belaka. Atas dasar itu tak sedikit yang meminta agar laporan atau penjelasan Ketua Mahkamah Agung di atas dapat diterima sepenuhnya dan masalahnya dianggap selesai. Apalagi dalam kasus ini tidak akan ada pihak yang diuntungkan apabila masalah yang menyangkut kewibawaan Mahkamah Agung itu sampai terus berlarut, kecuali hanya akan merugikan kita semua.

Masalahnya sekarang, mungkin hal itu bisa diterima masyarakat? Rasanya sulit. Apalagi setelah akhir-akhir ini santer terdengar akan dipecatnya Adi Andoyo dari jabatannya sebagai Ketua Muda Bidang Pidana Umum Mahkamah Agung, setelah sebelumnya yang bersangkutan dilarang membagikan perkara seperti yang sudah menjadi tugasnya selama ini maupun dilarang menghadiri Seminar.

Melihat kelanjutan merebaknya isu kolusi di Mahkamah Agung yang berbuntut adanya isu rencana pencopotan terhadap jabatan Adi Andoyo, tampak sekali, bahwa upaya memperbaiki citra Mahkamah Agung dan membongkar kolusi serta pembenahan kedalam MA ternyata tidak mendapat dukungan. Dengan demikian wajar kalau sampai Adi Andoyo merasa kecewa. Apalagi sebenarnya kita sudah dapat menduga bagaimana hasil penyidikan dari Tim Kowarsus tersebut. Yang intinya membantah adanya kolusi dalam perkara tersebut. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan.

Akhirnya dengan tetap menghormati keputusan hasil Kowarsus, tidak ada salahnya jika semua pihak khususnya

jajaran Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum untuk selalu melakukan introspeksi. Kelemahan dan kekurangan di Mahkamah Agung -- kalau itu ada -- hendaknya segera diatasi. Sebab sekali Mahkamah Agung tercoreng, kepada siapa lagi kita akan berlindung?

Di sisi lain, dengan menggunakan prinsip demokrasi, kita juga harus bisa memahami ketidakpuasan Adi Andoyo dalam upayanya menegakkan citra dan menghapus kolusi serta mengusulkan pembenahan manajemen dalam Lembaga tertinggi Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut, kita memerlukan sikap Arif yang menilai laporan Adi Andoyo sebagai sebuah masukan kritis yang selanjutnya perlu disikapi dengan dingin dan tenang, melalui pengkajian yang mendalam tentang fenomena adanya kolusi dan korupsi di tanah air.

Hasil akhir apa pun kasus yang menghebohkan itu sepantasnya kita tetap bersyukur karena masih ada orang-orang yang tetap komit terhadap tegaknya kebenaran di tanah air yang sangat kita cintai ini.

Semarang, 20 November 1996